

PUBLIKASI PENELITIAN TERAPAN DAN KEBIJAKAN

e-ISSN: 2621-8119

DOI: <https://doi.org/10.46774/pptk.v6i1.533>

Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kota Palembang

Inflation control policy planning in Palembang city

Shelly Vetria¹

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang¹

Korespondensi Penulis: Phone : +6281373479678 Email : shellyvetria@yahoo.co.id

Diterima : 27 Februari 2025

Direvisi : 10 Desember 2025

Diterbitkan : 30 Desember 2025



This is an open access article under the CC BY-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

PPTK is indexed Journal and accredited as Sinta 4 Journal
(<https://sinta.kemdikbud.go.id/journal/s/profile/7050>)

ABSTRACT

The increase in staple food prices often triggers "cost-push" inflation. This type of inflation occurs when rising production costs, including the price of raw materials, are passed on to consumers in the form of higher prices for goods and services. The Regional Inflation Control Team (TPID) still faces various challenges in carrying out its functions of price monitoring and control optimally. This policy paper adopts a qualitative approach using the SOAR analysis method (Strengths, Opportunities, Aspirations, and Results), drawing on interviews with government agencies, market traders, and consumers. The SOAR framework allows the study to focus not only on existing strengths and opportunities, but also on shared aspirations and realistic outcomes expected by stakeholders. The analysis shows that an Opportunity-Aspiration (OA) strategy is the most suitable approach for Palembang City. The recommendation is the issuance of a "Mayor of Palembang Decree on Crosscutting Programs for Regional Government Agencies and the Private Sector in Inflation Control" to take more concrete, precise, and responsive actions.

Keywords: Food Balance Sheets, Inflation, Inflation Control, Strategies, TPID.

ABSTRAK

Kenaikan harga bahan pokok sering kali memicu inflasi yang bersifat "cost-push". Inflasi jenis ini terjadi ketika kenaikan biaya produksi, termasuk harga bahan baku, diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian harga yang optimal. *Policy paper* ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, and Results) yang disusun berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat daerah, pedagang, dan masyarakat. Pendekatan SOAR memungkinkan perumusan kebijakan yang tidak hanya bertumpu pada kekuatan dan peluang, tetapi juga mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan serta hasil yang ingin dicapai secara nyata. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi *Opportunity-Aspiration* (OA) merupakan pilihan paling relevan bagi Kota Palembang, dengan fokus pada penguatan kerja sama pemerintah dan sektor swasta, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan harga, penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal, serta peningkatan pengawasan distribusi dan infrastruktur. Rekomendasi berupa "Keputusan Walikota Palembang tentang Crosscutting Program Kegiatan Perangkat Daerah Kota Palembang dan sektor swasta dalam Pengendalian inflasi untuk pengambilan langkah-langkah yang lebih konkret, tepat dan responsif".

Kata kunci: Inflasi, Neraca pangan, Pengendalian inflasi, Strategi, TPID.

PENDAHULUAN

Inflasi adalah fenomena ekonomi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu (Vetria, 2024). Inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga bahan pokok dapat memicu ketidakstabilan ekonomi dan mengurangi kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah yang pendapatannya sangat sensitif terhadap perubahan harga komoditas (Azwina and Syahbudi, 2022).

Sepanjang tahun 2024 hingga September, Kota Palembang mengalami empat kali inflasi (Februari, Maret, April, dan Mei) serta lima kali deflasi (Januari, Juni, Juli, Agustus, dan September). Secara tahunan, yaitu membandingkan September 2024 dengan September 2023 (year-on-year/yoY), tingkat inflasi Kota Palembang tetap terkendali di angka 1,41%. Namun, bila dibandingkan secara bulanan, yakni September 2024 terhadap Agustus 2024 (month-to-month/mom), terjadi deflasi sebesar 0,13%. Secara keseluruhan sejak Januari hingga September 2024 (year-to-date), tingkat inflasi tercatat sebesar 0,35%. Berdasarkan data dari BPS Kota Palembang, penurunan harga pada kelompok komoditas Makanan, Minuman, dan Tembakau, yang termasuk dalam kategori volatile foods, menjadi kontributor utama deflasi. Lima komoditas utama yang menyumbang penurunan harga adalah telur ayam ras, tomat, bawang putih, ikan gabus, dan ikan baung. Penurunan harga ini disebabkan oleh melimpahnya stok di peternak, masa panen, faktor cuaca/musim, serta intervensi kebijakan pemerintah. Kondisi tersebut sejalan dengan Neraca Pangan Nasional yang menunjukkan surplus.

Deflasi yang berlangsung dalam jangka waktu lama dan terus meningkat berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi dunia usaha, seperti pengurangan produksi dan penundaan investasi. Hal ini dapat memaksa organisasi Perangkat Daerah untuk menekan biaya produksi, termasuk melalui pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga

meningkatkan angka pengangguran dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Data nasional menunjukkan bahwa sebanyak 46,2 ribu pekerja terkena PHK selama periode Januari hingga Agustus 2024. Meski demikian, deflasi yang terjadi di Palembang selama empat bulan berturut-turut (Juni-September 2024) menunjukkan tren penurunan besar deflasi setiap bulannya. Hal ini mengindikasikan bahwa harga-harga mulai meningkat perlahan, dengan proyeksi kenaikan pada triwulan IV-2024. Dengan demikian, tingkat inflasi Kota Palembang di akhir 2024 diperkirakan tetap rendah dan sesuai dengan target nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$.

policy paper ini juga didasari oleh kenyataan bahwa bahan pokok merupakan komponen utama dalam perhitungan indeks harga konsumen (IHK) yang digunakan untuk mengukur inflasi. Kenaikan harga bahan pokok akan langsung mempengaruhi pergerakan IHK, dan akibatnya inflasi (Kristinae, 2018). Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), harga bahan pokok sering menjadi faktor dominan dalam menentukan tingkat inflasi bulanan maupun tahunan di Indonesia.

Lebih lanjut, *policy paper* mengenai Perencanaan Kebijakan Inflasi di Kota Palembang juga relevan dengan upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan stabilisasi harga. Intervensi pemerintah, seperti subsidi harga, pengendalian stok bahan pokok, serta kebijakan impor, dilakukan untuk menjaga stabilitas harga (Rahmanta and Maryunianta, 2020). Namun, kebijakan ini sering kali bersifat sementara dan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan. Faktor eksternal seperti perubahan harga komoditas global dan dinamika pasar internasional juga turut mempengaruhi harga bahan pokok di dalam negeri (Arjunita, 2016). Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memahami bagaimana harga bahan pokok mempengaruhi inflasi, serta bagaimana kebijakan yang tepat dapat diterapkan untuk menjaga stabilitas harga.

Dalam konteks ekonomi makro, kenaikan harga bahan pokok sering kali memicu inflasi yang bersifat "*cost-push*". Inflasi jenis ini terjadi ketika kenaikan biaya produksi, termasuk harga bahan baku, diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa. Dalam hal ini, bahan pokok yang mengalami kenaikan harga akan meningkatkan biaya hidup, terutama bagi rumah tangga yang alokasi pengeluarannya lebih besar pada bahan pangan. Kenaikan harga bahan pokok memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat inflasi, terutama pada segmen masyarakat dengan pendapatan rendah (Rahmanta and Maryunianta, 2020; Andi Amran Asriadi, Firmansyah and Husain, 2023).

Di sisi lain, dampak kenaikan harga bahan pokok terhadap inflasi tidak hanya terjadi di tingkat konsumen, tetapi juga berimbas pada sektor produksi. Kenaikan harga bahan pangan akan meningkatkan biaya produksi di sektor industri makanan dan minuman, yang pada gilirannya akan menyebabkan kenaikan harga produk akhir di pasar (Kusnadi, 2018; Mawarni et al., 2024). Dampak ini dikenal sebagai transmisi inflasi dari sektor hulu ke hilir. Lebih jauh, dalam literatur penelitian ekonomi, pengaruh harga bahan pokok terhadap inflasi sering kali menjadi fokus analisis dalam kebijakan moneter. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter berperan dalam menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi. Kenaikan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan pokok sering kali memicu respons kebijakan moneter, seperti penyesuaian suku bunga (Situmorang and Siahaan, 2024). Kenaikan harga bahan pokok memerlukan kebijakan moneter yang lebih hati-hati agar inflasi tidak berlanjut secara spiral, yang dapat merugikan pertumbuhan ekonomi (Rizaldy, 2017; Maharajabdinul et al., 2024).

Peraturan Daerah tentang inflasi, program penangangan inflasi, Berkaca dari fenomena tersebut diatas melandasi penulisan *policy paper* ini adalah keberadaan tim penanganan inflasi di Kota Palembang belum optimal mendukung perencanaan pembangunan yang disusun melalui RKPD Kota Palembang. Secara keseluruhan, *policy paper* ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai bagaimana perencanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kota Palembang. *policy paper* ini juga akan memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pihak terkait untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam Strategi Pengendalian Inflasi, Kerja Sama Antar Instansi, Indikator dan Target, serta Pemantauan dan Evaluasi mengendalikan inflasi. Dengan demikian, *policy paper* ini akan berkontribusi bagi pembuatan kebijakan ekonomi.

Perencanaan telah melakukan penilaian terhadap TPID dalam menangani inflasi terkait kebijakan dan program yang telah dilakukan. Dari perspektif kebijakan, ketergantungan pada impor memerlukan upaya diversifikasi sumber daya dalam negeri dan peningkatan kapasitas produksi lokal untuk mengurangi ketergantungan ini. Langkah-langkah seperti peningkatan produksi lokal melalui insentif kepada petani dan program intensifikasi pertanian dapat mengurangi kebutuhan impor dan menjaga stabilitas harga di pasar domestik. Selain itu, pemerintah juga dapat mengoptimalkan cadangan pangan strategis dan memperbaiki sistem distribusi untuk menanggulangi lonjakan harga akibat ketergantungan pada impor. Implementasi kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor dan menjaga kestabilan harga bahan pokok di Palembang dan wilayah lain di Indonesia. Identifikasi permasalahan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Permasalahan Inflasi Kota Palembang

Issue	Permasalahan		
	Kontroversi	Gap	Inkonsistensi
TPID belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian harga.	Sebagian masyarakat mendukung pasar murah, tetapi ada yang menilai tidak tepat sasaran.	Produsen pangan kesulitan memahami situasi pasar karena minim komunikasi.	Kebijakan tidak diterapkan merata ke seluruh wilayah.
Lemahnya koordinasi antar- Perangkat Daerah.	Ketergantungan impor <i>versus</i> peningkatan produksi lokal.	Tidak ada langkah sistematis jangka panjang untuk pengendalian inflasi.	Fokus lebih besar pada solusi jangka pendek dibandingkan jangka panjang seperti intensifikasi pertanian.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian harga yang optimal. Meskipun sebagian masyarakat mendukung inisiatif pasar murah sebagai solusi untuk menekan lonjakan harga, ada kritik yang menyebutkan bahwa program tersebut sering kali tidak tepat sasaran, sehingga manfaatnya tidak dirasakan oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan. Di sisi lain, produsen pangan menghadapi kesulitan dalam memahami situasi pasar akibat minimnya komunikasi yang terjalin antara mereka dengan pihak pengambil kebijakan. Selain itu, kebijakan yang diharapkan mampu menekan inflasi sering kali tidak diterapkan secara merata di seluruh wilayah, menimbulkan ketimpangan dan inkonsistensi dalam pelaksanaannya.

Pengendalian inflasi di tingkat daerah masih dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah lemahnya koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah yang menghambat penyusunan dan implementasi kebijakan yang terpadu. Ketergantungan pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan juga menjadi isu krusial yang bersaing dengan upaya peningkatan produksi lokal yang sering kali kurang mendapat prioritas. Selain itu,

absennya langkah-langkah sistematis jangka panjang untuk mengatasi inflasi menunjukkan bahwa fokus pengendalian lebih banyak diarahkan pada solusi jangka pendek, seperti operasi pasar, sementara upaya strategis seperti intensifikasi pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan belum dijadikan prioritas utama. Berdasarkan uraian diatas bahwa Pernyataan Permasalahan dari Makalah Kebijakan (*policy paper*) ini adalah **“Belum Optimalnya Perencanaan Kebijakan Pengendalian inflasi di Kota Palembang.”**

METODE ANALISIS

Metode Analisis policy paper ini adalah metode kualitatif berupa pertanyaan wawancara yang diberikan kepada pedagang dan pembeli di pasar Jakabaring, pasar KM 5, pasar Sako, pasar Lemabang, pasar 16 Ilir, pelaksana Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Satpol PP, PD Pasar, dan Bappeda Litbang Kota Palembang sejumlah 100 orang. Hasil wawancara dianalisis menggunakan SOAR (*Strengths, Opportunities, Aspirations, and Results*). Analisis SOAR merupakan salah satu alat perencanaan strategis dengan pendekatan yang

memfokuskan pada kekuatan dan berusaha untuk memahami keseluruhan sistem. Pendekatan SOAR terhadap rencana strategis memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan model tradisional. Analisis SOAR memungkinkan Page 16 Shelly Vetria - Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kota Palembang anggota organisasi menciptakan masa depan yang mereka inginkan sendiri dalam keseluruhan proses dengan cara melakukan penyelidikan, imajinasi, inovasi, daninspirasi. Fokus internal SOAR adalah kekuatan organisasi. SOAR juga digunakanuntuk analisis eksternal melihat aspek kekuatan, peluang, dan aspirasi (AristiyanaNur, 2015 cit. Santoso dan Widyatmini, 2021). *Strength (S)* Merupakan segala hal yang menjadi kekuatan dan kemampuanterbesar yang dimiliki, berupa asset baik asset yang berwujud maupun asset yangtidak berwujud yang mampu mendukung keberlangsungan usaha. Kekuatanakanterus dikembangkan demi kemajuan organisasi maupun individu di masa depan. *Opportunities (O)* Merupakan bagian dari lingkungan eksternal yang harus di analisisagar mudah memahami apa yang harus dilakukan agar dapat dimanfaatkan. Peluangakan memberikan manfaat bagi organisasi jika organisasi tersebut mampu meraihpeluang tersebut mampu meraih peluang tersebut dengan cepat dan tepat. *Aspirations(A)* Merupakan harapan, visi dan misi yang ingin dicapai guna membentukkepercayaan diri terhadap produk, pasar dan hal apapun yang dikerjakan demi mencapai visi yang diharapkan sehingga menimbulkan perasaan positif dan semangat dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan. *Result (R)* Merupakan hasil-hasil yanggingin dicapai dalam perencanaan strategis, guna mengetahui sejauh mana pencapaiandari tujuan yang telah disepakati Bersama. Agar para anggota organisasi merasatermotivasi

dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan ini, maka perlu dirancang sistem pengakuan dan *reward* yang menarik. Matriks SOAR berfungsi untuk menyusun faktor-faktor strategis yang menggambarkan bagaimana kekuatan dan peluang eksternal yang dihadapi organisasi Perangkat Daerah dapat disesuaikan dengan aspirasi dan hasil terukur yang dimilikinya Penjelasan matriks SOAR tersebut yaitu strategi SA adalah organisasi Perangkat Daerah merancang strategi tersebut dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada dalam organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai aspirasi yang diharapkan. Strategi OA adalah organisasi Perangkat Daerah merancang strategi tersebut untuk mengetahui dan memenuhi aspirasi setiap *stakeholder* atau anggota organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada peluang potensial yang ada. Strategi Page 17Shelly Vetria - Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kota Palembang SR adalah organisasi Perangkat Daerah merancang strategi tersebut untuk mewujudkan kekuatan yang ada pada organisasi Perangkat Daerah demi mencapai hasil yang terukur. Strategi OR adalah organisasi Perangkat Daerah merancang strategi tersebut berorientasi kepada peluang potensial yang ada untuk mencapai hasil yang sudah terukur. Analisis SOAR dimulai dengan melakukan analisis pada lingkungan eksternal dan internal serta industri untuk mencari peluang apa yang tersedia. Kemudian seluruh peluang dan kekuatan yang dimiliki akan dimasukkan kedalam analisis SOAR untuk kemudian menghasilkan aspirasi dan hasil. Analisis ini dipilih sebab SOAR memiliki kelebihan dimana pendekatan yang diterapkan fokus pada peluang dan kekuatan dibandingkan kelemahan dan ancaman.

ANALISIS SOAR

Strength

No	Variabel	Bobot	Rating	BxR
1	Adanya koordinasi antara Perangkat Daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) memperkuat kemampuan dalam pengendalian inflasi	17,76	3	53,28
2	Perangkat Daerah yang terlibat dalam penanganan inflasi menggunakan data yang akurat untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab inflasi.	17,52	2	35,04
3	Memitigasi ketersediaan pasokan pangan, terutama jenis pangan yang penting bagi masyarakat Kota Palembang dengan menyusun Neraca Bahan Makanan (NBM) oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian..	17,48	1	17,48
4	Perangkat Daerah berperan dalam implementasi program subsidi dan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak inflasi, seperti bantuan pangan dan subsidi harga	18,16	4	72,64
5	Penyusunan Peta Jalan (<i>Road map</i>) inflasi Tahun 2025- 2026 untuk pengambilan Langkah-langkah yang lebih tepat dan responsif.	18,4	5	92

Opportunity

No	Variabel	Bobot	Rating	BxR
1	Menjalin Kemitraan yang lebih erat antara perangkat Daerah dan sektor swasta, khususnya dalam hal pengadaan dan distribusi bahan pokok yang stabil.	17,96	5	89,8
2	Penggunaan teknologi informasi dalam memantau fluktuasi harga bahan pokok secara real-time dapat menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi oleh Perangkat Daerah	17,84	4	71,36
3	Peluang lain terletak pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran serta mereka dalam pengendalian inflasi, melalui edukasi tentang perilaku konsumsi yang bijak dan pemahaman terhadap kebijakan yang diterapkan	17,52	2	35,04
4	Diversifikasi sumber pasokan bahan pokok, baik melalui peningkatan produksi lokal maupun kerja sama dengan produsen luar daerah, membuka	17,48	1	17,48

	peluang untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan yang rentan terhadap gangguan inflasi			
5	Pemanfaatan program digital untuk mempercepat dan memperluas distribusi bantuan sosial yang dapat mengurangi dampak inflasi pada masyarakat miskin dan rentan	17,76	3	53,28

Aspiration

No	Variabel	Bobot	Rating	BxR
1	Mengupayakan kebijakan pengendalian inflasi yang tidak hanya menekan harga barang, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang paling terdampak oleh inflasi	17,68	2	35,28
2	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengendalian inflasi, melalui edukasi dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan konsumsi yang bijak	17,44	1	17,44
3	Memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam pemantauan harga dan distribusi bahan pokok, guna mempercepat respons terhadap fluktuasi harga yang dapat memicu inflasi.	17,76	4	71,04
4	Menciptakan ketahanan pangan yang lebih tangguh, melalui pemanfaatan potensi lokal dan penguatan sistem distribusi, sehingga daerah tidak rentan terhadap krisis harga bahan pokok	18,04	5	90,2
5	Kebijakan subsidi untuk produk lokal dapat dilakukan dengan memberikan subsidi harga agar produk lokal lebih terjangkau oleh konsumen, sekaligus memberlakukan tarif impor yang lebih tinggi untuk bahan pangan yang dapat diproduksi secara lokal.	17,75	3	53,28
6	Menciptakan kestabilan harga bahan pokok dan mendukung ketahanan ekonomi lokal dengan menyalurkan kelebihan stok bahan pokok, terutama yang mudah busuk, kepada UMKM setempat untuk diolah menjadi produk tahan lama.	18,32	7	128,24
7	Pengawasan pasar tidak hanya terbatas pada area depan pasar, tetapi juga mencakup pemantauan secara menyeluruh hingga ke area belakang pasar untuk pengawasan yang lebih komprehensif	18,12	6	108,72

Result

No	Variabel	Bobot	Rating	BxR
1	Kebijakan optimalisasi cadangan pangan strategis mampu menjaga stabilitas pasokan bahan pokok selama krisis.	17,56	3	52,68
2	Peningkatan operasi pasar murah di wilayah terdampak berhasil membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga bahan pokok	17,56	2	34,88
3	Pengembangan neraca pangan efektif dalam mengidentifikasi surplus dan kekurangan bahan pokok secara akurat.	17,44	1	17,4
4	Peningkatan koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah melalui TPID menghasilkan pengendalian inflasi yang lebih efektif.	17,64	4	70,56
5	Kebijakan pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan penyediaan fasilitas penyimpanan bahan pokok, memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga.	18,04	7	126,28
6	Intervensi pemerintah dalam pengawasan harga bahan pokok secara rutin berhasil menekan praktik spekulasi harga.	17,92	5	89,6
7	Pengawasan distribusi bahan pokok oleh TPID meningkatkan efisiensi distribusi dan mengurangi kelangkaan di pasar.	18,04	6	108,24

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Teori Inflasi

a. Teori Kuantitas Uang (*Quantity Theory of Money*): Teori ini menyatakan bahwa inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar lebih besar daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kaitan antara harga bahan pokok dan inflasi dapat dikaitkan dengan peningkatan permintaan akan bahan pokok yang memicu kenaikan harga (Friedman, 1968).

b. *Cost-Push Inflation*: Teori ini menjelaskan bahwa inflasi terjadi akibat kenaikan biaya produksi, termasuk harga bahan pokok. Peningkatan biaya tersebut akhirnya mendorong kenaikan harga barang dan jasa di pasar.

c. *Demand-Pull Inflation*: Teori ini menyatakan bahwa inflasi terjadi ketika permintaan agregat dalam perekonomian melebihi kapasitas produksi. Permintaan yang lebih tinggi dari bahan pokok tertentu, terutama selama musim-musim tertentu, dapat memicu inflasi.

2. Teori Perencanaan

Teori perencanaan memberikan landasan konseptual yang penting untuk memahami dan mengarahkan proses penyusunan kebijakan atau tindakan strategis guna mencapai tujuan tertentu. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah teori rasional, yang menekankan proses analisis logis dan sistematis. Pendekatan ini mencakup

identifikasi masalah, penentuan tujuan, pengumpulan data, evaluasi alternatif, dan implementasi keputusan. Dengan pendekatan rasional, perencanaan sering diterapkan dalam konteks teknokratik seperti pembangunan infrastruktur dan kebijakan public (Silmi, 2024).

Selain teori rasional, teori advokasi dan partisipasi menawarkan perspektif yang lebih inklusif dalam perencanaan. Teori advokasi menekankan pentingnya representasi kelompok-kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan merata. Sementara itu, teori partisipasi menyoroti peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, yang dapat meningkatkan keberlanjutan dan akseptabilitas kebijakan.

3. Regulasi dan Kebijakan Pengendalian Inflasi Pemerintah Kota Palembang saat ini.

Pemerintah Kota Palembang telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait pengendalian inflasi di Kota Palembang:

1. Keputusan Walikota Palembang Nomor 134/KPTS/V/2020 Tahun 2020 tentang Tim Pengendalian inflasi Daerah Kota Palembang.
2. Keputusan Walikota Palembang Nomor .41/KPTS/V/2021 Tahun 2021 tentang.
3. Keputusan Walikota Palembang Nomor 23/KPTS/V/2022 Tahun 2022 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
4. Keputusan Walikota Palembang Nomor 334/KPTS/V/2020 Tahun 2020 tentang Tim Penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Pengendalian Inflasi dan Deflasi Daerah Kota Palembang
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor 13/KPTS/V/2022 Tahun 2022 tentang Peta Jalan (*Road Map*) pengendalian inflasi Kota Palembang periode 2022 - 2024

Kebijakan Pemerintah Kota Palembang dalam pengendalian inflasi saat ini Sesuai yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun 2025 bahwa Untuk tahun 2024 ini dan 2025 mendatang diprediksikan ancaman inflasi masih terus berlanjut, khususnya krisis pangan sebagai dampak terjadinya krisis iklim sehingga Pemerintah Kota Palembang terus melakukan *monitoring* ketersediaan stok dan harga secara berkala serta berbagai upaya agar laju inflasi dapat dikendalikan. Beberapa upaya yang dilakukan, antara lain: (a) Memantau penyaluran/distribusi beras bekerjasama dgn Bulog dan beberapa komoditi pangan melalui skema kerjasama antar daerah; (b) Mitigasi stabilitasi pasokan & harga pangan; (c) Menggalakkan Gerakan Pangan Murah (GPM) seperti operasi pasar murah; dan (d) Penguatan cadangan pangan daerah.

4. Metode Analisis

Dari kondisi peran TPID Kota Palembang yang ada dan setelah dilakukan *environmental scanning* di Kota Palembang dengan analisa SOAR, maka didapat masing-masing variabel untuk *Strengths, Opportunities, Aspirations, dan Results*. Variabel-variabel ini merupakan potensi yang ditemukan dalam rangka membangun konsepsi optimalisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang. Telah dilakukan pengolahan data hasil jawaban responden terhadap instrumentasi SOAR yang telah diberikan, dimana dilakukan perhitungan terhadap bobot (B) dan penentuan rating (R) dari bobot yangada. Bobot (B) diperoleh dengan rumus sebagai berikut: Bobot (B) = Jumlah responden per pertanyaan x 100% Total seluruh jawaban responden Rating diperoleh dari melihat peringkat bobot yang telah dihitung. Semakin

besar nilai bobot maka semakin tinggi nilai rating, demikian pula sebaliknya.

Variabel Kekuatan (*Strength*)

Hal-hal yang menjadi kekuatan serta aset terbesar yang dimiliki diungkapkan, baik aset yang berwujud maupun aset yang tidak berwujud. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk memberikan penghargaan terhadap segala hal-hal positif yang dimiliki, yang pasti akan selalu dimiliki baik oleh individu maupun organisasi. Kekuatan inilah yang akan terus dikembangkan demi kemajuan organisasi maupun individu di masa depan. Hasil analisis untuk variabel kekuatan memperlihatkan bahwa variabel st5 memiliki R (nilai urgensi) dan bobot (faktor tertinggi), yaitu 5 dan 18,4%. Sedangkan variabel st3 memiliki R (nilai urgensi) dan bobot (faktor terendah), yaitu 1 dan 17,48%. Jumlah total skor untuk kekuatan adalah 270,44.

Variabel Peluang (*Opportunities*)

Opportunities adalah peluang terbaik dari lingkungan eksternal yang dimiliki serta dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Lingkungan eksternal adalah sebuah wilayah yang penuh dengan berbagai macam kemungkinan dan peluang. Salah satu syarat bagi keberhasilan suatu organisasi adalah kemampuannya memaksimalkan peluang yang dimiliki. Hal ini mensyaratkan adanya cara pandang yang positif dalam memandang lingkungan eksternal yang berubah dengan sangat cepat. Hasil analisis untuk variabel peluang memperlihatkan bahwa variabel op1 memiliki R (nilai urgensi) dan bobot (faktor tertinggi), yaitu 5 dan 17,96%. Sedangkan variabel op4 memiliki R (nilai urgensi) dan bobot (faktor terendah) yaitu 1 dan 17,84%. Jumlah total skor untuk peluang adalah 266,96

Variabel Harapan (*Aspirations*)

Para anggota TPID berbagi aspirasi dan merancang kondisi masa depan yang diinginkan,

yang dapat menimbulkan rasa percaya diri dan kebanggaan baik terhadap diri sendiri, pekerjaan, maupun organisasi secara keseluruhan. Saling berbagi aspirasi ini menjadi hal yang sangat penting guna menciptakan tujuan yang disepakati bersama, yang menjadi panduan bagi TPID ke depan. Hasil analisis untuk variabel Harapan memperlihatkan bahwa variabel as6 memiliki R (nilai urgensi) dan bobot (faktor tertinggi), yaitu 7 dan 18,32%. Sedangkan variabel as2 memiliki R (nilai urgensi) dan bobot (faktor terendah), yaitu 1 dan 17,44%. Jumlah total skor untuk harapan adalah 468,92.

Variabel Hasil (*Results*)

Results berarti menentukan ukuran dari hasil-hasil yang ingin dicapai (measurable results) dalam perencanaan strategis guna mengetahui sejauh mana pencapaian dari tujuan yang telah disepakati bersama. Agar para anggota TPID merasa termotivasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan ini. Hasil analisis untuk variabel hasil memperlihatkan bahwa variabel re5 memiliki R (nilai urgensi) dan bobot (faktor tertinggi), yaitu 7 dan 18,04%.

Sedangkan variabel re3 memiliki R (nilai urgensi) dan bobot (faktor terendah), yaitu 1 dan 17,4%. Jumlah total skor untuk hasil adalah 446,96. Konsepsi **“Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Kota Palembang dalam Pengendalian inflasi di Kota Palembang”** Berdasarkan matriks SOAR dan analisis SOAR yang telah dilakukan diatas, maka diperoleh perhitungan strategi sebagai berikut: 1. Strategi SA: Gunakan Kekuatan untuk mencapai Harapan. $S + A = 270,44 + 468,92 = 739,36$ 2. Strategi SR: Gunakan Kekuatan untuk mencapai Hasil yang terukur. $S + R = 270,44 + 446,96 = 717,4$ 3. Strategi OA: Gunakan Peluang untuk mencapai Harapan. $O + A = 266,96 + 468,92 = 735,88$ 4. Strategi OR: Gunakan Peluang untuk

mencapai Hasil yang terukur. $O + R = 266,96 + 446,96 = 713,92$ **Dari hasil olah data kuesioner diperoleh hasil strategi OA (Opportunity-Aspiration) yang paling tinggi dengan jumlah 735,88.** Strategi OA adalah strategi terpilih yang berorientasi dengan memanfaatkan peluang potensial yang ada untuk mencapai harapan. Pemerintah Kota Palembang memiliki banyak peluang potensial dalam Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang. Adapun peluang potensial tersebut secara berurutan dapat berupa: (1) Menjalin kemitraan yang lebih erat antara Perangkat Daerah dan sektor swasta, khususnya dalam hal pengadaan dan distribusi bahan pokok yang stabil (op1); (2) Penggunaan teknologi informasi dalam memantau fluktuasi harga bahan pokok secara *real-time* dapat menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi oleh Perangkat Daerah (op2); (3) Pemanfaatan program digital untuk mempercepat dan memperluas distribusi bantuan sosial yang dapat mengurangi dampak inflasi pada masyarakat miskin dan rentan (op5); (4) peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran serta mereka dalam pengendalian inflasi, melalui edukasi tentang perilaku konsumsi yang bijak dan pemahaman terhadap kebijakan yang diterapkan (op3); (5) Diversifikasi sumber pasokan bahan pokok, baik melalui peningkatan produksi lokal maupun kerja sama dengan produsen luar daerah, membuka peluang untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan yang rentan terhadap gangguan inflasi (op4). Dengan memaksimalkan peluang yang ada, maka akan diperoleh harapan yang diingikan seperti: (1) Menciptakan kestabilan harga bahan pokok dan mendukung ketahanan ekonomi lokal dengan menyalurkan kelebihan stok bahan

pokok, terutama yang mudah busuk, kepada UMKM setempat untuk diolah menjadi produk tahan lama (as6); (2) Pengawasan pasar tidak hanya terbatas pada area depan pasar, tetapi juga mencakup pemantauan secara menyeluruh hingga ke area belakang pasar untuk pengawasan yang lebih komprehensif (as7); (3) Menciptakan ketahanan pangangan lebih tangguh, melalui pemanfaatan potensi lokal dan penguatan sistem distribusi, sehingga daerah tidak rentan terhadap krisis harga bahan pokok (as4); (4) Memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam pemantauan harga dan distribusi bahan pokok, guna mempercepat respons terhadap fluktuasi harga yang dapat memicu inflasi (as3); (5) Kebijakan subsidi untuk produk lokal dapat dilakukan dengan memberikan subsidi harga agar produk lokal lebih terjangkau oleh konsumen, sekaligus memberlakukan tarif impor yang lebih tinggi untuk bahan pangangan yang dapat diproduksi secara lokal (as5); (6) Mengupayakan kebijakan pengendalian inflasi yang tidak hanya menekan harga barang, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang paling terdampak oleh inflasi (as1); (7) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengendalian inflasi, melalui edukasi dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan konsumsi yang bijak (as2).

PILIHAN KEBIJAKAN

Analisis SOAR memperlihatkan bahwa variabel yang memiliki nilai urgensi dan bobot faktor tertinggi adalah: 1. *Strengths*: Penyusunan Peta Jalan (*Road Map* Inflasi Tahun 2025-2026 untuk Pengambilan langkah-langkah yang lebih tepat dan responsif (st5); 2. *Opportunities*: Menjalin kemitraan yang lebih erat antara Perangkat Daerah dan Sektor Swasta, khususnya dalam hal pengadaan dan distribusi bahan pokok (op1); 3. *Aspirations*: Menciptakan ketahanan

pangan yang lebih tangguh melalui pemanfaatan potensi lokal dan penguatan sistem distribusi, sehingga daerah tidak rentan terhadap krisis harga bahan pokok (as4) 4. *Results*: Kebijakan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan penyediaan fasilitas penyimpanan bahan pokok, memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga (re5); Pemerintah Kota Palembang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pengendalian Inflasi di Kota Palembang. Untuk itu, sesuai dengan strategi OA (strategi terpilih).

KESIMPULAN

1. Menjalin kemitraan yang lebih erat antara perangkat daerah dan sektor swastakhususnya dalam hal pengadaan dan distribusi bahan pokok yang stabil. Misalnya, pemerintah dapat bekerja sama dengan distributor besar untuk menjamin pasokan bahan pokok tetap tersedia meski terjadi gangguan produksi atau distribusi. Selain itu, kemitraan ini dapat mencakup pemberian insentif kepada pelaku usaha lokal, seperti subsidi transportasi atau pengurangan biaya pajak untuk distribusi bahan pokok tertentu. Pemerintah juga dapat memfasilitasi pertemuan reguler antara perangkat daerah, distributor, dan petani lokal untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam distribusi bahan pokok. 2. Menciptakan ketahanan pangan melalui pemanfaatan potensi lokal dan penguatan sistem distribusi sehingga daerah tidak rentan terhadap krisis harga bahan pokok. Ketahanan pangan di Kota Palembang dapat diperkuat dengan mendorong pemanfaatan potensi lokal, misalnya melalui kerja sama dengan petani lokal yang selama ini produksinya cenderung tergantung pada pasokan dari daerah lain. Pemerintah dapat memberikan pendampingan teknis, seperti pelatihan teknik pertanian modern atau penyediaan bibit unggul, untuk meningkatkan produktivitas komoditas lokal seperti cabai merah dan bawang merah. Selain itu,

penguatan sistem distribusi juga perlu dilakukan dengan memastikan infrastruktur penunjang, seperti akses jalan ke daerah-daerah produksi, dalam kondisi baik. Misalnya, cold storage sederhana dapat dibangun di daerah penghasil bahan pokok untuk mengurangi tingkat kerusakan produksi yang mudah rusak selama proses distribusi. Dengan langkah-langkah ini, daerah tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga memiliki cadangan pangan yang dapat digunakan saat terjadi krisis harga bahan pokok.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam menjawab 2 (dua) *issue* utama permasalahan Pengendalian Inflasi di Kota Palembang, maka diperoleh rekomendasi sebagai berikut:

“Keputusan Walikota Palembang tentang Crosscutting Program Kegiatan Perangkat Daerah Kota Palembang dan sektor swasta dalam Pengendalian inflasi untuk pengambilan langkah-langkah yang lebih konkret, tepat dan responsif.”

Dokumen *crosscutting* pengendalian inflasi biasanya mencakup beberapa aspek strategis untuk mengendalikan inflasi melalui kerja sama antar Perangkat Daerah Kota Palembang dan pihak swasta, dan memuat beberapa poin yang terdapat dalam dokumen tersebut yaitu Strategi Pengendalian Inflasi oleh Tim Pengendalian inflasi Daerah (TPID), Kerja Sama Antar Instansi, Indikator dan Target, serta Pemantauan dan Evaluasi, **dokumen ini akan dituangkan menjadi regulasi Pemerintah Kota Palembang dalam pengendalian inflasi di Kota Palembang.**

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Y. N. (2019). Tinjauan Teori

- Perencanaan Dalam Pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana Desa. *Jurnal Litbang Sukowati* 3(1)
- Aldillah, R. (2019) 'Dinamika Perubahan Harga Padi Jagung Kedelai serta Implikasinya terhadap Pendapatan Usaha Tani', *Forum penelitian Agro Ekonomi*, 36(1), p. 23. Available at: <https://doi.org/10.21082/fae.v36n1.2018.2> 3-44.
- Alfionita, S.P. and Rusli, Z. (2023) 'Pengawasan Harga Sembako Menjelang Perayaan Hari-Hari Besar Tertentu di Kota Pekanbaru', *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(2), pp. 400–406. Available at: <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1085>.
- Alwi, M. (2017) 'Pandangan Islam Tentang Kenaikan Harga Bahan Pokok Sewaktu Waktu', *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 2(1), p. 75. Available at: <https://doi.org/10.35329/jalif.v2i1.450>.
- Andi Amran Asriadi, Firmansyah and Husain, N. (2023) 'Analisis Pengaruh Harga Kebutuhan Pangan Pasar Tradisional Terhadap Inflasi Di Kota Makassar', *Jurnal AGRIBIS*, 16(1), pp. 2054–2071. Available at: <https://doi.org/10.36085/agribis.v16i1.4652>.
- Apriyadi, R. and Hutajulu, D.M. (2020) 'Pengaruh Harga Komoditas Pangan Hewani Asal Ternak Terhadap Inflasi Di Provinsi D.I. Yogyakarta', *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 7(2), pp. 52–71. Available at: <https://doi.org/10.36987/ecobi.v7i2.1774>.
- Arjunita, C. (2016) 'Faktor Faktor yang Mempenaruhi Inflasi di Indonesia', *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 5(2).
- Azahari, D.H. (2008) 'Membangun Kemandirian Pangan dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional', *Analisis Kebijakan Pertanian*, 6(70), pp. 174–195.
- Azwina, R. and Syahbudi, M. (2022) 'Pengaruh Fluktuasi Harga Komoditas Pangan Terhadap Inflasi di Provinsi Sumatera Utara tahun (2019-2021)', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(1), pp. 238–249. Available at: <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.1373>.
- Bardach, E. (2012). *A practical Guide for Policy Analysis - The Eight Fold Guide to more Effective Problem Solving*. California: Sage Publications
- Baun, M. et al. (2024) 'Pengaruh Kenaikan Bahan Pokok Terhadap Anak Kos', *JUEB : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), pp. 47–50. Available at: <https://doi.org/10.57218/jueb.v3i1.981>.
- Cahyani, J., Mujahidin, S. and Fiqar, T.P. (2023) 'Implementasi Metode Long Short Term Memory (LSTM) untuk Memprediksi Harga Bahan Pokok Nasional', *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JustIN)*, 11(2), p. 346. Available at: <https://doi.org/10.26418/justin.v11i2.57395>.
- Dewi, G.P. and Ginting, A.M. (2012) 'Antisipasi Krisis Pangan melalui Kebijakan Diversifikasi Pangan', *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 3(1), pp. 66–75.
- Engkus (2017) 'Implementasi Undang-Undang Perdagangan: Implikasinya dalam Kebijakan Penegndalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat', *Jurnal Litigasi*, 18(1), pp. 1–40.
- Fatimah, S. (2020). *Teori Perencanaan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia

- Hardono, G.S. (2016) 'Strategi Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal', *Analisis Kebijakan Pertanian*, 12(1), p. 1. Available at:
<https://doi.org/10.21082/akp.v12n1.2014.1-17>.
- Indraswari, G.A., Anjani, R.R. and Jamal, A. (2024) 'Evaluasi Keputusan Pemerintah Melalui Pasar Murah dalam Menjaga Stabilisasi Harga Bahan Pokok di Surabaya', *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(2), p. 14. Available at:
<https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2420>.
- Kariyasa, K. and Suryana, A. (2012) 'Strengthening Food Security by Reducing Wasteful Food Consumption.', *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(3), pp. 269–288. Available at:
<http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/ART10-3e.pdf>.
- Kristinae, V. (2018) 'Analisis Pengaruh Indeks Harga Konsumen Terhadap Inflasi (Studi Kasus Pada Inflasi Kota Palangka Raya dan Kab. Sampit di Kalimantan Tengah)', *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), pp. 1–11.
- Kusnadi, N.A. (2018) 'Pengaruh Fluktuasi Harga Komoditas Pangan Terhadap Inflasi Di Provinsi Jawa Timur', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 6(2), p. 19. Available at:
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5128>.
- Maharajabdinul *et al.* (2024) 'Sinergitas Kenbijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal untuk Mengendalika Inflasi di Inflasi', *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, 5(1), pp. 14–27.
- Mantau, Z. and Bahtiar (2010) 'Kajian Kebijakan Harga Pangan Nonberas Dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional', *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, 29(2), pp. 58–65.
- Mawarni, T.S. *et al.* (2024) 'Analisis Perkembangan Harga Bahan Pangan Pokok Di Pasar Domestik Indonesia Tahun 2023 Analysis of the Development in Prices of Staple Food Ingredients in the Indonesian Domestic Market in 2023', *Jupensal*, 1(2), pp. 87–97.
- Nainggolan, K. (2008) 'Ketahanan Dan Stabilitas Pasokan, Permintaan, Dan Harga Komoditas Pangan', *Analisis Kebijakan Pertanian*, 6(2), pp. 114–139.
- Prihatin, S.D., Samsi, S. and & mudiyono, H. (2015) 'Ancaman Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani', *Jurnal Ilmiah CIVIS*, II(2), pp. 1–13.
- Rahmanta, R. and Maryunianta, Y. (2020) 'Pengaruh Harga Komoditi Pangan Terhadap Inflasi Di Kota Medan', *Jurnal Agrica*, 13(1), pp. 35–44. Available at:
<https://doi.org/10.31289/agrica.v13i1.3121>.
- Rasidi, M. and Ramli (2020) 'Model Kebijakan Pengendalian Harga Bahan Pokok Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kaupaten Situbondo', *Jurnal Agribest*, 10(10), pp. 34–44.
- Resnia, R. (2012) 'Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok (Bapok) Dan Daya Beli Kelompok Masyarakat Berpendapatan Rendah', *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 6(2), pp. 169–188.
- Rizaldy, D.Z. (2017) 'Pengaruh Harga Komoditas Pangan Terhadap Inflasi Di Kota Malang Tahun 2011-2016', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), p. 171. Available at:
<https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5363>.

Rusono, N. (2019) 'Strengthening policy on government rice stock management', *Jurnal Pangan*, (i), pp. 1–12. Available at: <https://www.jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/download/450/389/1409>.

Salasa, A.R. (2021) 'Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia', *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1), pp. 35–48. Available at: <https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357>.

Silmi, N. *et al.* (2024). 'Perencanaan Dalam Ilmu Pengantar Manajemen'. *Jurnal of Student Research (JSR)*. 2(1)

Siswanto, A. *et al.* (2024) 'Optimalisasi Sistem Informasi Ketersediaan Perkembangan Harga Bahan Pokok (SISKAPERBAPO) Sebagai Media Informasi 9 Bahan Pokok Di Bondowoso', 2, pp. 335–344.

Situmorang, P.L. and Siahaan, R.L.M. (2024) 'Analisis Hubungan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Riris Lawitta Maulina Siahaan Universitas Musamus', *Jieap*, 1(2), pp. 245–255. Available at: <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i2.158>.

Vetria, S. (2024) 'Optimalisasi Peran Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) Kota Palembang dalam Penanggulangan Inflasi di Kota Palembang', *Journal of Mandalika Social Science*, 2, pp. 43–52. Available at: <https://journal.institutemandalika.com/index.php/jomss>.

Wirabrata, A. and Silalahi, S.A.F. (2012) 'Hubungan Infrastruktur Transportasi dan Biaya Logistik', *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 3(1), pp. 79–90. Available at: <http://www.bisnis.com/articles/>.